



# LAPORAN KINERJA DITJEN PSDKP

## TRIWULAN I TAHUN 2024



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang triwulan I tahun 2024 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kerjanya, dibuktikan dengan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan nilai sebesar 106,97%, dengan kategori **“baik”**. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2024 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 5 (lima) kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP** yaitu **“Profesional, Integritas, Loyalitas, inovAtif dan sineRgi”** dan *core value* **“ASN BerAKHLAK”** mewujudkan **PSDKP PANTANG TERCELA**.

Jakarta, 3 Mei 2024

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M.

# DAFTAR ISI

**i**

**Kata Pengantar**

**ii**

**Ikhtisar Eksekutif**

**1**

**Bab I Pendahuluan**

**2**

**Bab II Perencanaan Kinerja**

**3**

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

**4**

**Bab IV Penutup**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2024.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2024 mencapai **106,97%**, dengan kategori “baik”. Pada triwulan I tahun 2024, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya, dan seluruhnya tercapai melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada IKU Indeks Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (tercapai 96,93%) dan IKU Indeks Kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (tercapai 92,49%). Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan I	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	-	-	-
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89%	-	-	-
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	91,32	100,35
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	57,50	55,73	96,93
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	45	57,74	120
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	30	97,75	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	30	27,75	92,49
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan I	Realisasi	%
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	-	-	-
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	-	-	-
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5%	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80%	80%	84,29%	105
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94%	94%	133,33%	120
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	91,59	108
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	-	-	-
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDKP sampai dengan triwulan I tahun 2024 antara lain: pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, operasional pusat pengendalian, pembangunan prasarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Selain kegiatan teknis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan

kegiatan manajerial antara lain: penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, serta Implementasi program budaya kerja "PILAR".

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp. 147.986.850.045 atau sebesar 12,97%.

# BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

## Kebijakan Ekonomi Biru



Memperluas Kawasan Konservasi Laut



Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota



Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan



Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

## A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

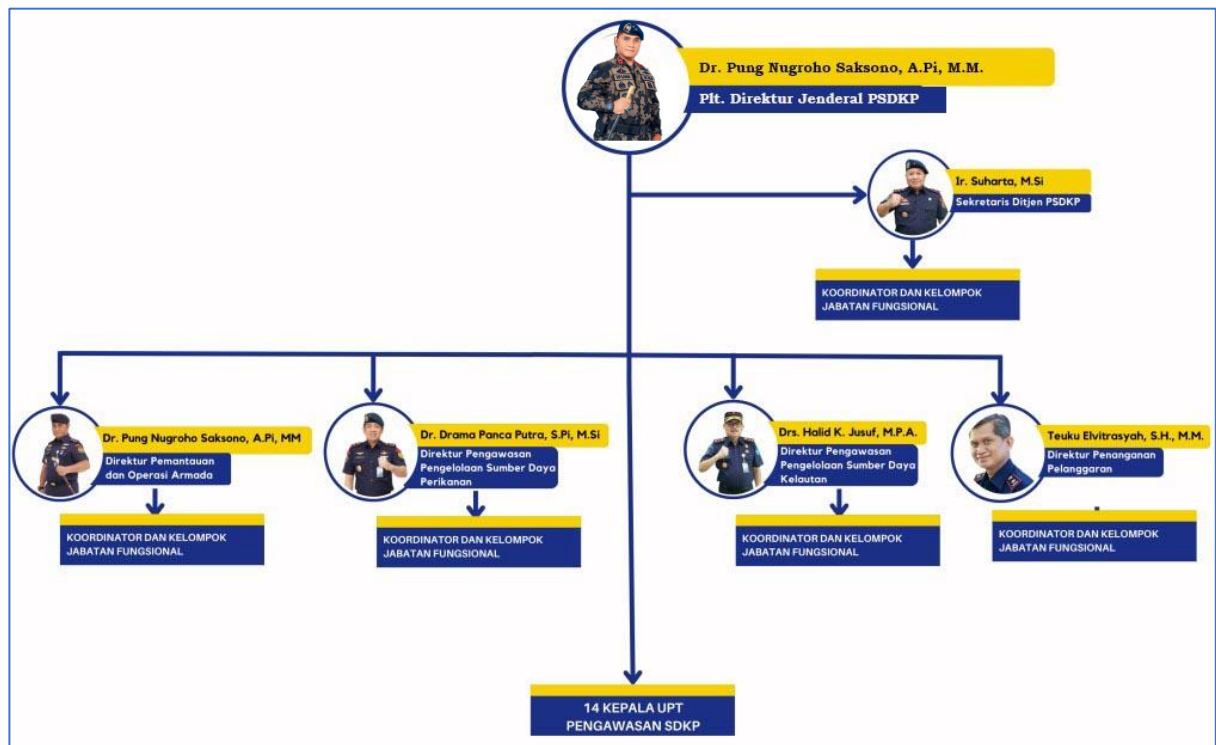
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP



## 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



## B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Pemanfaatan Ruang laut membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mengawal kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi belum memiliki perizinan.
2. Distribusi importasi hasil perikanan tidak sesuai peruntukannya yang mengancam hasil tangkapan nelayan lokal.
3. Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
4. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).

### C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP</p>	<p><b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b></p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024</p>
<p><b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b></p> <p>Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2024</p>	<p><b>BAB IV PENUTUP</b></p> <p>Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan</p>

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

### 1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

### 2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP

tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

### 3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*).

Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat						
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
	Persentase kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif						
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas						
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93
Program 2 Dukungan Manajemen							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89
---	-------	----	----	----	----	----

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terhadap indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2024 sebagaimana dibahas dibawah ini.

## B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
	tertib dan bertanggung jawab (nilai)	
Persentase kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024 disajikan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	74
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	89
Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	91
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	81
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	15
11	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3,3
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	82
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	84
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	80
16	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	94
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
20	Nilai hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	76
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	93,76
22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

### C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjajaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP pada triwulan I tahun 2024 sebesar **106,97%**, dengan kategori “**Baik**” yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan I	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	-	-	-
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89%	-	-	-
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	91,32	100,35
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	57,50	55,73	96,93
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	45	57,74	120
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	30	97,75	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	30	27,75	92,49
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70	-	-	-
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan I	Realisasi	%
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	-	-	-
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5%	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80%	80%	84,29%	105
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94%	94%	133,33%	120
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	91,59	108
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	-	-	-
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

## B. Evaluasi Dan Analisis

### SASARAN PROGRAM 1

KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

#### IKU 1. Nilai Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDKP Yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pencapaiannya pada triwulan I, sehingga belum ada realisasinya, namun terdapat kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan yaitu:

Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Public Information Campaign (PIC) pemberian pemahaman nelayan pelintas batas pada tanggal 8 dan 22 Maret 2024. Koordinasi melibatkan Eselon I KKP, Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Pemda, UPT Ditjen PSDKP dan Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP. Rencana dilaksanakan bulan akhir Mei atau awal Juli di Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara.

## IKU 2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pencapaiannya pada triwulan I, sehingga belum ada realisasinya, namun beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan antara lain:

- Pembinaan Pokmaswas di Kampung Lele, Kab. Kediri, Jawa Timur pada tanggal 6 Februari 2024 oleh Stasiun PSDKP Cilacap. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, DKP Kab. Kediri serta 85 anggota Pokmaswas di Kab. Kediri.
- Pembinaan teknis pokmaswas pada tanggal 4 Maret 2024 di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pangkep, DKP Pangkep, KCD Pangkep, Dit. PSDK, Pangkalan PSDKP Bitung, serta 200 peserta pokmaswas.
- Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 pada tanggal 19-21 Maret 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh TA Komisi IV DPR RI, Dit. POA, Dit.PSDK, Itjen KKP, Setditjen PSDKP dan UPT lingkup Ditjen PSDKP.
- Rapat koordinasi kegiatan pembinaan Pokmaswas Tahun 2024 pada tanggal 25 Maret 2024 di Direktorat POA, dihadiri perwakilan Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP, Sekjen KKP, (luring) dan DKP Provinsi (daring). Pada kegiatan ini membahas pembinaan pokmaswas tahun 2024, evaluasi tahun 2023, serta pembahasan final draft petunjuk teknis penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional.





Gambar 1. Pembinaan pokmaswas dan Sosialisasi dan Sinkronisasi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat pada triwulan I tahun 2024.

### IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	112,9	100%	100%	100%	100%	100	100	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 WPPNRI. Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap aktivitas kapal-kapal diseluruh WPPNRI. Pemantauan menggunakan citra satelit antara lain *Automatic Identification System (AIS)*, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pemantauan melalui pesawat patroli.

Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)*, dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang dikapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP pada periode triwulan I Tahun 2024, Bulan Maret terpantau sebanyak 4.660 kapal yang beroperasi di seluruh WPPNRI, meningkat dari awal hasil pemantauan bulan Januari sebanyak 475 kapal dari 5.135 kapal.




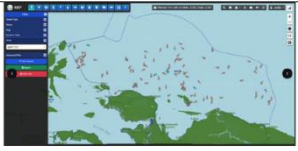





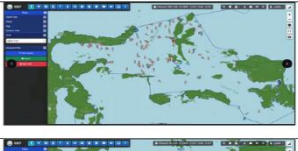
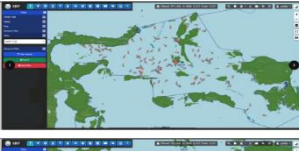










Rekapitulasi hasil pemantauan kapal perikanan sepanjang periode triwulan I Tahun 2024, disajikan pada Tabel 3.





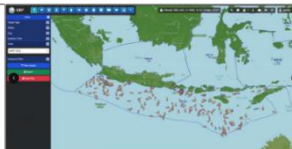
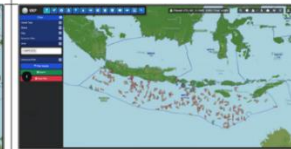

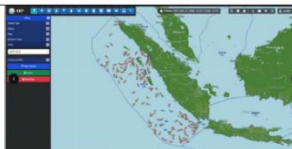



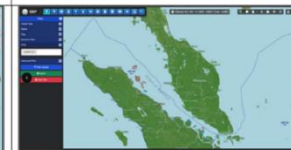
Tabel 3.2.

Pemantauan Kapal melalui SPKP Triwulan I Tahun 2024

WPPNRI	Januari	Februari	Maret
571	30	29	40
572	229	229	237
573	485	483	479
711	305	351	639
712	2337	2086	1917
713	257	181	163
714	65	132	99
715	328	291	327
716	80	57	117
717	121	144	128
718	898	768	514
<b>Total</b>	<b>5135</b>	<b>4751</b>	<b>4660</b>

Tabel 3.3 Pemantauan WPP NRI menggunakan VMS

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	718			
2	717			
3	716			
4	715			
5	714			
6	713			
7	712			








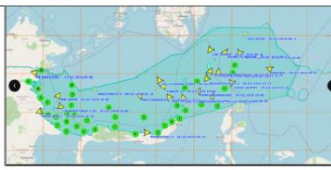




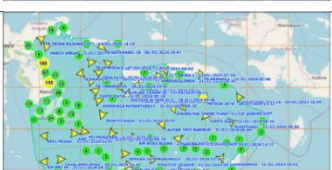

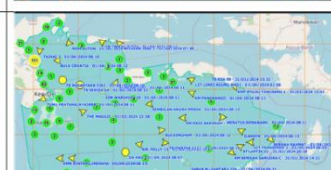








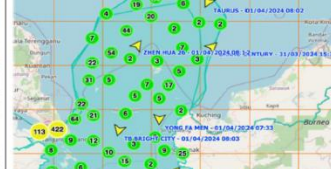



No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
8	711			
9	573			
10	572			
11	571			

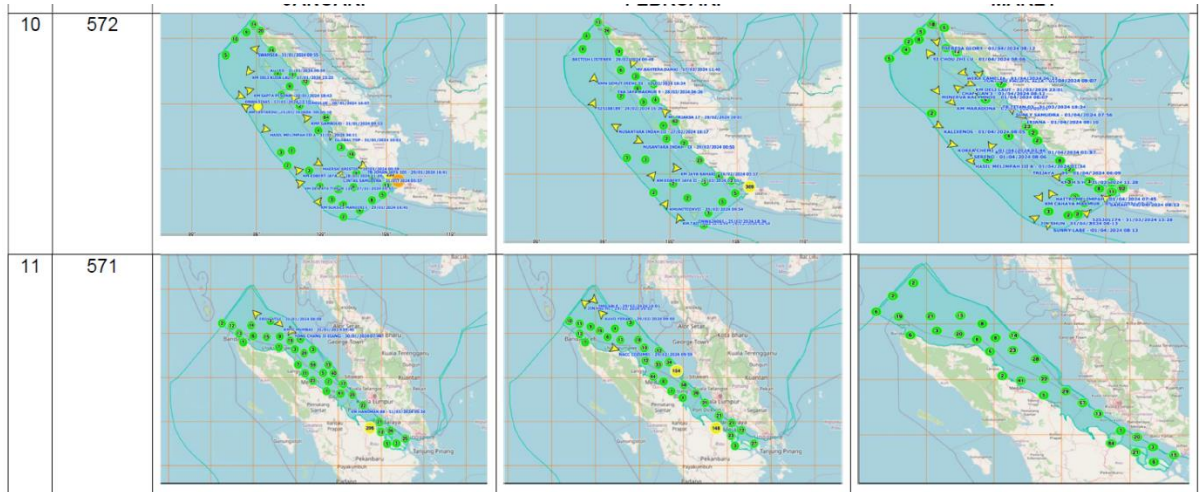
Pemantauan kapal menggunakan AIS telah dilakukan diseluruh WPPNRI, tercatat sebanyak 7661 kapal terpantau di Bulan Maret 2024. Kapal yang terpantau adalah semua jenis kapal yang melakukan operasi atau berlayar, tidak hanya kapal perikanan saja, termasuk juga kapal jenis lain baik berbendera Indonesia ataupun berbendera asing yang melintas di WPPNRI. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal menggunakan AIS disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.4. Pemantauan kapal melalui AIS

WPPNRI	Januari	Februari	Maret
571	687	799	513
572	1029	549	369
573	599	654	460
711	3229	3415	1364
712	3753	3790	1775
713	1983	1751	1170
714	815	785	430
715	583	570	341
716	256	264	170
717	114	122	61
718	1878	1938	1008
<b>Total</b>	<b>14926</b>	<b>14637</b>	<b>7661</b>

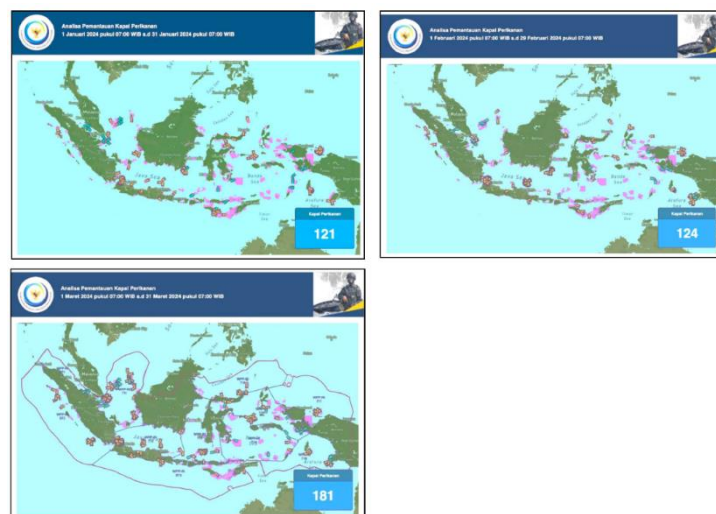
Tabel 3.5 Pemantauan WPP NRI menggunakan AIS

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	718			
2	717			
3	716			
4	715			
5	714			
6	713			
7	712			
8	711			
9	573			



Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pemantauan dikawasan konservasi dilakukan untuk memantau kapal-kapal yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut. Pada triwulan I 2024, dilaksanakan pemantauan di kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pemantauan sebanyak 426 kapal terdiri atas 121 kapal beroperasi dibulan Januari, 124 di bulan Februari dan 181 di bulan Maret 2024.



Gambar 2. Hasil pemantauan VMS di kawasan konservasi periode Januari – Maret 2024



Realisasi tahun triwulan I 2024 jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2023, sama yaitu 100%, namun berbeda pada tahun 2022. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan formulasi perhitungan, dimana pada tahun 2022 menggunakan data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah SKAT yang diterbitkan sedangkan ditahun 2023 dan 2024 yang dihitung capaian adalah jumlah WPPNRI yang terpantau. Pada Renstra 2020-2024 indikator kinerjanya adalah Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal fishing* dengan target 75%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target renstra.

#### **IKU 4. Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP**

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89,4	91	91	91,32	100,35	100,35	-	-

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Indeks Kinerja	Nilai
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	90.93
Speedboat Pengawas	83.03
Pesawat Patroli	100
	<b>91.32</b>

#### **Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan**

Ditjen PSDKP memiliki 34 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan dilaut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi diseluruh WPPNRI dengan target hari operasi tahun 2024 sebanyak 75 hari Operasi. Penempatan Kapal Pengawas KP tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia untuk beroperasi di 11 WPPNRI. Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



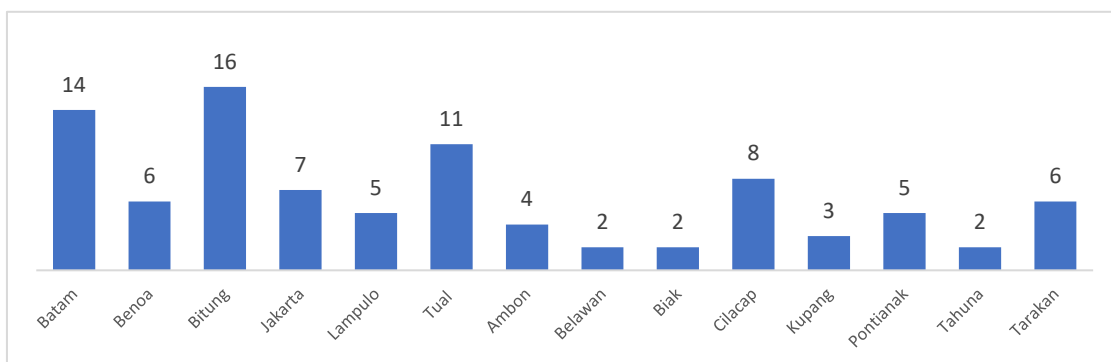
Gambar 3 Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Pada periode triwulan I tahun 2024, rata-rata hari operasi 10 hari operasi dan berhasil memeriksa 903 Kapal terdiri dari 891 KII dan 3 KIA, 10 kawasan konservasi serta mengawasi 214.951 nm<sup>2</sup> WPPNRI. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 31 kapal terdiri dari 28 KII dan 3 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP.



### Kinerja Speedboat Pengawas

Tahun 2024, Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 speedboat pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat. Telah dilaksanakan operasi speedboat pengawasan s.d TW I dengan rata-rata hari operasi sebesar 3,3 hari operasi dan jumlah riksa sebanyak 517 kapal perikanan. Adapun jumlah tangkapan speedboat pengawasan sebanyak 4 KII.



Gambar 4. Sebaran speedboat pengawas di UPT PSDKP sebagai berikut:



Gambar 5. Speedboat Pengawas Napoleon 39 berhasil menghentikan, memeriksa, dan menahan (Henrikhan) satu unit kapal pengangkut ikan asal Filipina di WPPNRI 716 Laut Sulawesi.

### Kinerja Pesawat Patroli

Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Hawker, King Air dan ATR. Operasi Patroli Udara s.d Periode III telah mencapai 42 hari operasi yang dilakukan di sebagian WPPNRI 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 dengan total Coverage Area mencapai 312.568 NM2 terpantau 34 KIA dan 491 KII.

## IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

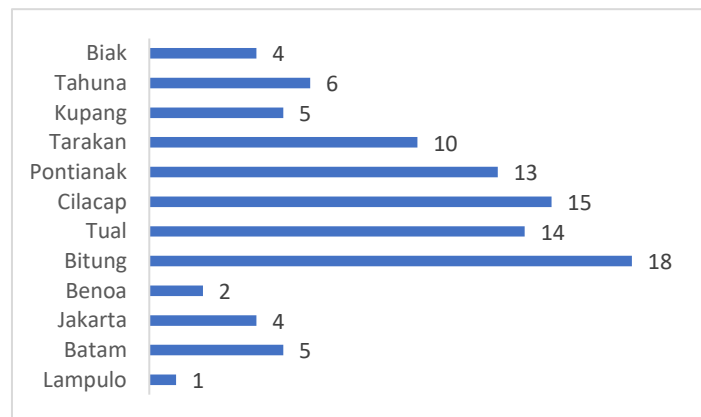
Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	81	57,5	55,73	96,93	68,80	-	-

### Pemeriksaan pelaku usaha kelautan

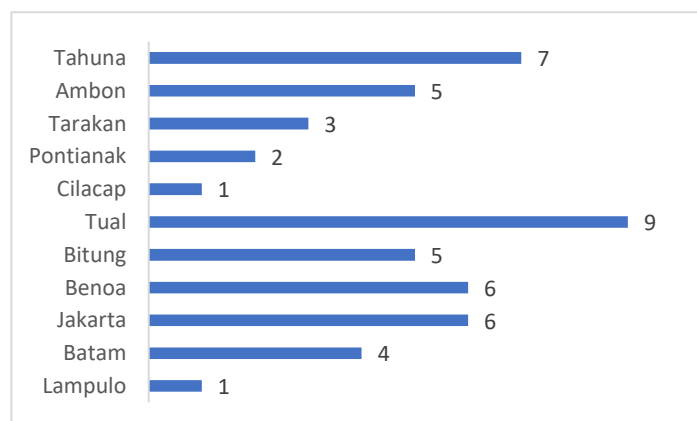
Pada triwulan I Tahun 2024 pelaku usaha kelautan diperiksa/diawasi sebanyak 483 pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan oleh Polsus PWP3K yang berada di UPT Pengawasan SDKP dan satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Indonesia. Terdapat 6 (enam) objek yang dilakukan pengawasan, sebagai berikut :

No	Pengawasan	Diperiksa
1	Pemanfaatan ruang laut	59
2	Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau CITES	49
3	Kawasan konservasi nasional	73
4	Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil (P3LP3K)	39
5	Destructive Fishing	166
6	Pencemaran perairan	97
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>

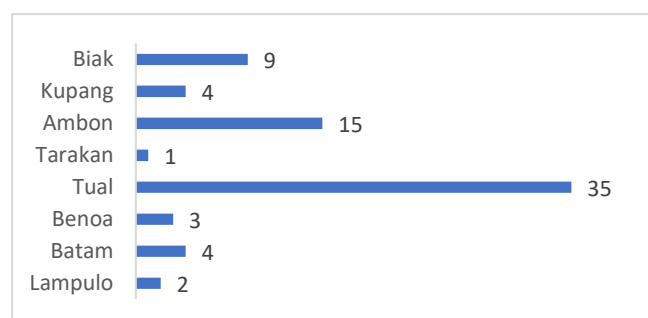
- a. Pengawasan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja 12 (dua belas) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 97 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan I adalah di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 18 pelaku usaha.



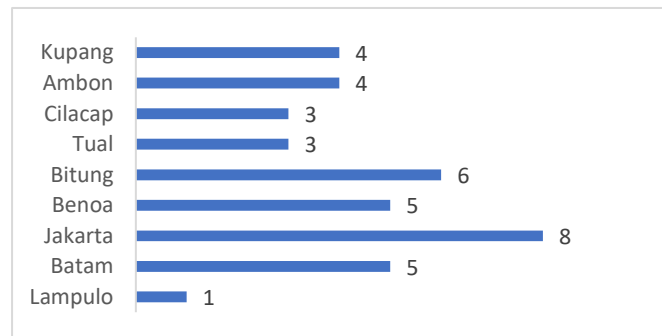
- b. Pengawasan terhadap pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES di wilayah kerja 11 (sebelas) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 49 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan I adalah di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual sebanyak 9 pelaku usaha.



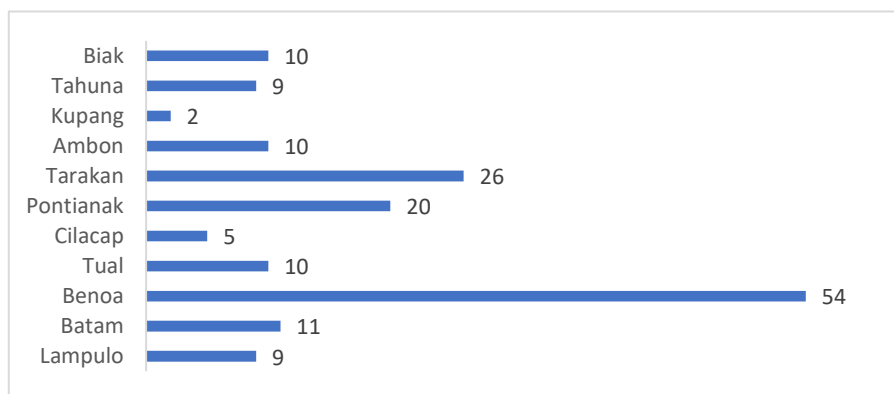
- c. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan di 8 (delapan) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 73 pelaku usaha di kawasan konservasi perairan. Berdasarkan pemeriksaan di triwulan I Tahun 2024, Pangkalan PSDKP Tual paling banyak memeriksa sebanyak 35 pelaku usaha.



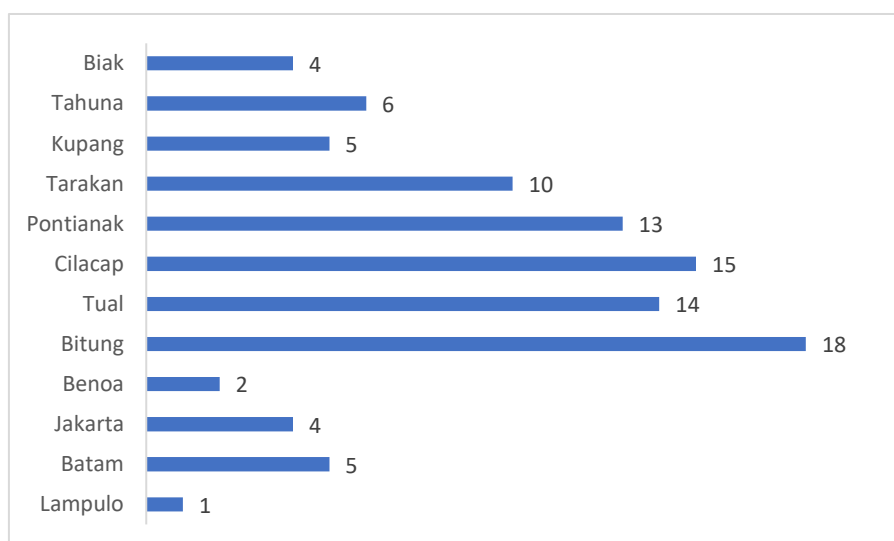
- d. Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut (termasuk wisata tirta dan garam), Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3LP3K) dilakukan terhadap pelaku usaha di wilayah kerja 9 (sembilan) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 39 pelaku usaha. Pengawasan objek ini merupakan pengawasan perizinan berusaha, kecuali ikan dilindungi dan kawasan konservasi. Pelaku usaha di wilayah Jakarta adalah yang paling banyak diperiksa pada triwulan I tahun 2024.



- e. Pengawasan terhadap kegiatan destructive fishing (DF) di wilayah kerja 11 (sebelas) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 166 pelaku usaha. Pelaku usaha di wilayah Benoa paling banyak diperiksa pada triwulan I tahun 2024.



- f. Pengawasan terhadap kegiatan pencemaran perairan di wilayah kerja 12 (dua belas) UPT Ditjen PSDKP dan berhasil memeriksa 97 pelaku usaha. Pelaku usaha di wilayah Bitung paling banyak diperiksa pada triwulan I tahun 2024.



## Pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Pada triwulan I tahun 2024, jumlah pelaku usaha yang diperiksa sejumlah 302 pelaku usaha. Hasil pemeriksaan 302 pelaku usaha tersebut terdiri dari 4 subsektor sebagai berikut:

No	Subsektor	Diperiksa
1	Pengawasan penangkapan ikan	16
2	Pengawasan pengolahan hasil perikanan	78
3	Pengawasan pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan	38
4	Pengawasan pembudidayaan ikan	170
	<b>Jumlah</b>	<b>302</b>

Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh pengawas perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak rutin (mendukung Penangkapan Ikan terukur), sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
1	Batam	6
2	Benoa	12
3	Bitung	20
4	Jakarta	143
5	Lampulo	4
6	Tual	23
7	Ambon	2
8	Belawan	18
9	Biak	6
10	Cilacap	53
11	Pontianak	9
12	Tahuna	2
13	Tarakan	4
	<b>Jumlah</b>	<b>302</b>

Terdapat 1 (satu) UPT PSDKP yang masih belum melakukan kegiatan pemeriksaan dikarenakan terkendala beberapa hal sebagai berikut:

- Penerbitan Surat Tugas Kunjungan Lapangan (STKL) dari aplikasi OSS ;
- Adanya kendala pada sistem OSS.
- Kebijakan penangkapan ikan terukur yang belum implementatif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi pada periode Triwulan I Tahun 2024 dilakukan beberapa upaya di periode Triwulan II Tahun 2024:

- Usulan rencana pengawasan yang telah disusun pada tahun 2023 sebagian besar dilakukan di Triwulan II Tahun 2024;
- Berkoordinasi dengan BKPM kendala di sistem OSS, sehingga rencana pengawasan dapat dilakukan sesuai jadwal;

- c) Berkoordinasi dengan UPT PSDKP sebagai pelaksana pengawasan, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d) Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap sebagai penanggungjawab kebijakan penangkapan ikan terukur;

### Verifikasi Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan

Verifikasi dilakukan terhadap hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Tujuannya dilakukan Verifikasi untuk memastikan kualitas hasil pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang selanjutnya menetapkan kepatuhan pelaku usaha. Uraian hasil verifikasi sebagai berikut:

#### 1) Kelautan

Pada tahun 2024, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan terdiri dari penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K. Adapun verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K adalah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi dan/atau CITES, pemanfaatan kawasan konservasi nasional, Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil (P3LP3K), penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF.

Pada triwulan I, sebanyak 483 pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan 259 pelaku usaha diantaranya atau 53,62% sudah dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi
1	Pemanfaatan ruang laut	59	39
2	Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau CITES	49	28
3	Kawasan konservasi nasional	73	29
4	Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil (P3LP3K)	39	10
5	Destructive Fishing	166	64
6	Pencemaran perairan	97	89
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>	<b>259</b>

#### 2) Perikanan

Tahapan verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan data dukung hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas Perikanan di UPT Pengawasan SDKP kepada Ditjen PSDKP. Data dukung dinyatakan lengkap apabila melampirkan Surat Pemberitahuan, Surat Tugas, Daftar Pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kesesuaian pengisian fom Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan

pengawas perikanan terdapat indikasi ketidaksesuaian maka akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan jenis tindak lanjut yang akan dilakukan.

Tindak lanjut berupa pembinaan dan perbaikan akan diberikan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi standar mutu dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko namun bukan termasuk pelanggaran administratif maupun pidana. Tindak lanjut berupa rekomendasi sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.

Laporan hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang dilaporkan periode Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 302 laporan. Sebanyak 246 laporan telah terverifikasi sedangkan 56 laporan masih proses pendalaman.

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa	Jumlah Pelaku yang Diverifikasi
1	Batam	6	6
2	Benoa	12	10
3	Bitung	20	17
4	Jakarta	143	134
5	Lampulo	4	4
6	Tual	23	10
7	Ambon	2	
8	Belawan	18	7
9	Biak	6	
10	Cilacap	53	50
11	Pontianak	9	6
12	Tahuna	2	2
13	Tarakan	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>302</b>	<b>246</b>

Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan berupa 3 jenis rekomendasi akhir yaitu: Telah Memenuhi Syarat (TMS), Pembinaan dan Perbaikan, serta Pengenaan Sanksi. Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan periode Triwulan I diketahui:

- a) Telah memenuhi syarat sebanyak 90 pelaku usaha; dan
- b) Sanksi administratif sebanyak 7 pelaku usaha yaitu, 125 pelaku usaha diberikan pembinaan dan perbaikan dan 24 pelaku usaha diberikan rekomendasi pencabutan non likuidasi.

### **Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

Dari 125 kode proyek pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan, sebanyak 100 kode proyek telah disampaikan surat tindak lanjut kepada Eselon I terkait dan UPT Ditjen PSDKP, namun belum tinjau progressnya.

Lebih lanjut, sebanyak 66 pelaku usaha kelautan juga telah disampaikan rekomendasi dan tindak lanjutnya kepada UPT Ditjen PSDKP, namun belum ditinjau progressnya.



Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2024, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- a) Meningkatkan jumlah laporan hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terverifikasi;
- b) Menetapkan mengkoordinasikan dan memantau penyelesaian tindak lanjut/rekomendasi terhadap pelaku usaha selanjutnya melaporkan.

#### **IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP**

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	59,80	80	45	57,74	120	120	-	-

Capaian Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperoleh dari indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP sebesar 97,73 dan indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP sebesar 17,74. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, maka nilainya lebih kecil 2,06. Pada tahun 2020-2022 belum dilakukan perhitungan karena IKU ini baru ada pada tahun 2023.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan sarana pengawasan berupa laporan kondisi teknis (lapkonis) terhadap peralatan navigasi, peralatan komunikasi, perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, konstruksi kapal, perlengkapan tambat labuh, mesin utama, dan sistem propulsi, mesin bantu dan sistem perpompaan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi dua, nilai > 75% dinyatakan siap dan nilai <75 dinyatakan tidak siap. Penilaian terhadap kesiapan sarana pengawasan triwulan I terhadap 34 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan nilai total kesiapan sebesar 97,73.

**REKAPITULASI INDEKS KESIAPAN SARANA PENGAWASAN TRIWULAN I  
TAHUN 2024**

No	Nama Kapal	Penanggung Jawab	Nama Alat										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KP Orca 01	Dit. POA	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75
2	KP Orca 02	Dit. POA	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	KP Orca 03	Dit. POA	94	96	96	100	100	67	100	100	100	100	100
4	KP Orca 04	Dit. POA	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	KP Orca 05	Dit. POA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	KP Orca 06	Dit. POA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	KP Barakuda 01	Dit. POA	100	80	89	100	100	100	100	100	100	100	100
8	KP Barakuda 02	Dit. POA	100	100	100	100	100	100	100	100	91	100	100
9	KP HMT 01	Dit. POA	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	67
10	KP HMT 02	Dit. POA	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	67
11	KP Paus 01	Dit. POA	90	83	83	100	100	100	100	100	100	100	100
12	KP HMC 01	PSDKP Pontianak	88	100	89	100	83	100	100	100	50	75	75
13	KP HMC 03	PSDKP Kupang	88	100	78	100	100	100	100	100	100	100	75
14	KP HMC 04	PSDKP Biak	78	75	72	88	100	100	100	100	100	100	100
15	KP HMC 05	PSDKP Batam	100	100	78	100	100	100	100	100	100	100	75
16	KP HMC 06	PSDKP Tual	87	86	90	100	100	100	100	100	100	100	80
17	KP Hiu 01	PSDKP Belawan	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	100
18	KP Hiu 02	PSDKP Bitung	65	80	89	100	100	100	100	100	100	100	50
19	KP Hiu 03	PSDKP Batam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	KP Hiu 04	PSDKP Cilacap	82	80	67	86	50	100	100	100	100	100	50
21	KP Hiu 05	PSDKP Bitung	76	100	78	100	100	100	100	100	100	100	25
22	KP Hiu 06	PSDKP Jakarta	76	80	87	100	67	100	100	100	100	100	25
23	KP Hiu 07	PSDKP Tarakan	100	100	89	100	83	100	100	100	100	100	25
24	KP Hiu 08	PSDKP Belawan	94	100	89	100	83	100	100	100	100	100	100
25	KP Hiu 09	PSDKP Benua	88	80	89	100	83	67	100	100	100	100	100
26	KP Hiu 10	PSDKP Jakarta	100	100	89	100	83	100	100	100	100	100	75
27	KP Hiu 11	PSDKP Pontianak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	KP Hiu 12	PSDKP Lampulo	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	KP Hiu 13	PSDKP Ambon	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	KP Hiu 14	PSDKP Tual	87	79	88	100	100	75	100	100	100	100	100
31	KP Hiu 15	PSDKP Tahuna	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	KP Hiu 16	PSDKP Belawan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	KP Hiu 17	PSDKP Batam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	KP Akar Bahar	Dit. POA	80	100	100	100	100	33	100	100	100	100	100
Rata-rata			91,88	94,68	92,03	99,24	94,56	95,35	100	100	98,26	84,24	
Bobot			5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	
Indeks			4,59	4,73	4,60	9,92	2,36	2,38	50	10	4,91	4,21	
<b>Total Indeks Kesiapan</b>			<b>97,73</b>										

**Keterangan Nama Alat:**

1. Peralatan Navigasi
2. Peralatan Komunikasi
3. Perlengkapan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran
4. Konstruksi Kapal
5. Perlengkapan Tambat Labuh
6. Pendingin Ruangan
7. Mesin Utama
8. Mesin bantu
9. Sistem Propulsi dan Kemudi
10. Sistem Perpompaan

Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi bangunan pengawasan utama di UPT PSDKP yaitu pos pengawasan/kantor, bangunan operator/mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara dan Gedung serbaguna. Pada triwulan I tahun 2024, sebanyak 3 (tiga) UPT Pengawasan SDKP yang dinilai, sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Triwulan I			Rata-rata	Bobot	Indeks
		Cilacap	Batam	Jakarta			
1	Pos Pengawasan/Kantor	100	100	96,25	21,16	30	6,35
2	Bangunan Operator/Mess		97		12,13	25	3,03
3	Dermaga		100		25	20	5,00
4	Gudang		96,25		24,06	10	2,41
5	Tempat Penampungan Sementara		67		9,57	10	0,96
6	Gedung Serbaguna					5	0,00
<b>Capaian</b>							<b>17,74</b>

### SASARAN PROGRAM 3

#### PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

##### IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	92,24	80	30	97,75	120	120	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran Administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil peneanaan sanksi administratif dan penyelesaian kewajiban pelaku atas peneanaan sanksi administratif, sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	100,00	70%	70,00
Penyelesaian kewajiban pelaku atas peneanaan sanksi administratif	92,50	30%	27,75
			<b>97,75</b>

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Peneanaan sanksi administratif menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain peneanaan sanksi administratif untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- Dit. PP (Pusat) untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;

- c) UPT PSDKP/Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- d) Dit. PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 97,75 diperoleh dari Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 42 pelanggaran dan total kasus pelanggaran administratif yang ditangani sebanyak 42 pelanggaran.

Tabel 3.6. Penyelesaian Penanganan Sanksi Administratif 2024

No.	Lokasi Penanganan Perkara	Total Kasus		Kasus Selesai	
		SPKP	Sanksi Adm	SPKP	Sanksi Adm
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	178	0	160	0
2	Pangkalan PSDKP Batam	16	15	11	15
3	Pangkalan PSDKP Lampulo	24	1	22	1
4	Pangkalan PSDKP Benua	36	0	3	0
5	Pangkalan PSDKP Bitung	13	3	2	3
6	Pangkalan PSDKP Tual	53	1	13	1
7	Stasiun PSDKP Cilacap	86	0	84	0
8	Stasiun PSDKP Tahuna	0	0	0	0
9	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	0	0
10	Stasiun PSDKP Kupang	0	0	0	0
11	Stasiun PSDKP Biak	1	0	1	0
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	16	4	16
13	Stasiun PSDKP Belawan	8	2	8	2
14	Stasiun PSDKP Pontianak	16	4	0	4
	<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>42</b>	<b>308</b>	<b>42</b>

Persentase penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif diperoleh dari jumlah billing denda administratif yang telah dipenuhi pelaku usaha terhadap jumlah billing denda yang diterbitkan.

## SASARAN PROGRAM 4

### PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

#### IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86,42	86	30	27,75	92,49	32,26	-	-

Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penyelesaian penyidikan dan kualitas penyidikan sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	10	70%	7
Indeks kualitas penanganan TPKP	69,16	30%	20,75
			27,75

#### Penyelesaian penyidikan TPKP

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Nilai capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 ini sebesar 27,75. Nilai ini diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 10 kasus dengan jumlah kasus yang sudah selesai (P21) 1 kasus.

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	TPP / TPK
1	Batam	1	0	1 kasus TPP
2	Bitung	5	0	2 kasus TPP 3 kasus TPK
3	Tual	1	1	1 kasus TPK
4	Tahuna	2	0	2 kasus TPP
5	Belawan	1	0	1 kasus TPP
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	

Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I tahun 2024, jumlah kasus terbanyak terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung, didalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan alat tangkap bahan peledak dalam melakukan kegiatan *destructive fishing*. Namun, 1 kasus yang selesai P21 terdapat di Pangkalan PSDKP Tual, berupa tindak pidana kelautan *destructive fishing*. Sejumlah 9 (sembilan) kasus merupakan tindak pidana perikanan kegiatan IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Myanmar yang diproses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan, kapal berbendera Filipina diproses di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna, dan satu kapal berbendera Indonesia di Stasiun PSDKP Tahuna. Untuk proses penanganan penyidikan yang belum selesai

pada Triwulan I dikarenakan kasus tersebut masuk pada akhir Triwulan I sehingga proses penanganannya akan dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

### Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata- rata dari indeks perkasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada Triwulan I tahun 2024 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan, persentase supervisi penanganan barang bukti, dan persentase supervisi penanganan awak kapal. Uraian penjelasan sebagai berikut:

#### a) Supervisi penyidikan

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 6 kasus dari total 10 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 6 kasus dan kelautan 4 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.7.

Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2024

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM	SUDAH SUPERVISI
Tindak Pidana Perikanan				
1	Levie Cawasa	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap I	V
2	Min Tun	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap I	V
3	Myo Myin Tun	Stasiun PSDKP Belawan	Tahap I	-
4	Rix Dias	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
5	Juanito Capuyan	Stasiun PSDKP Tahuna	Penyidikan	-
6	Jos Mantelagheng	Stasiun PSDKP Tahuna		-
Tindak Pidana Kelautan				
1	Abdul Jabar R.	Pangkalan PSDKP Tual	P-21	-
2	Turang	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
3	Arjuna	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
4	Rangga Geni	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V

b) Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan I tahun 2024 yaitu sebanyak 6 (enam) unit. Tahapan pembobotan supervisi penanganan barang bukti adalah:

Tabel 3.8.

Lokasi supervisi tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan I tahun 2024

No	Naman Barang Bukti	Pengumpulan Data Penanganan Barbuk	Penentuan lokasi supervisi prioritas	Pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring Barbuk	Pelaksanaan Penyerahan Barbuk	Nilai
1	KF 5032	20	20	55	5	100
2	PSF 2500	20	20	55		95
3	FB LB Jose Maria A-2	20	20	55		95
4	KM Tanpa Nama	20	20	55		95
5	FB Queen Davie	20	20	55		95
6	Perahu Tanpa Nama	20	20	55		95
7	FBCA Franchezka-01/KM EPM	20	20	55		95
	<b>Total</b>					670
Rata-Rata dari 7 Barang Bukti						<b>95,71</b>

c) Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal Triwulan I tahun 2024 dilaksanakan di 6 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan I tahun 2024 yaitu sebanyak 44 awak kapal yang masuk dalam proses hukum, tahapan pembobotan supervisi penanganan awak kapal adalah:

Tabel 3.9.  
Tahapan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Awak Kapal TPKP	Rata-rata
1	penyerahan tersangka/ bukan tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10	44	440
2	pendataan dan penempatan tersangka/ bukan tersangka di tempat yang memadai	40	44	1760
3	merawat dan mengamankan awak kapal/tersangka/bukan tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke kantor Imigrasi/rudenim	45	10	450
4	tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka warga negara asing (WNA) ke kantor Imigrasi/Rudenim atau pemulangan awak kapal bukan tersangka warga negara Indonesia (WNI)	5	6	30
<b>Total</b>				2680
Rata-rata dari 44 ABK				<b>60,91</b>

## SASARAN PROGRAM 5

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

#### 1. IKM 9 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.



Pada tahun 2024 ditargetkan nilai indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan I tahun 2024, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

## 2. IKM 10. Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	15	-	-	-	-	8	-

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2024 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 15 unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2024, ditargetkan 3 unit kerja yang berpredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain koordinasi secara terus menerus dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

## 3. IKM 11 Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% thd TW I	% thd tahun	Target	%Capaian thd target akhir

				2024	2024	2024	2024	2024	2024	Renstra
-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	3	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2024 akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV Tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2024. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi tahun 2024.

#### 4. IKM 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	82	-	-	-	-	76	-

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2024 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan I 2024, namun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain adalah sinkronisasi data pada situs MyASN dengan SIMPEG KKP, pelayanan administrasi sumberdaya manusia aparatur, koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah; pencantuman gelar terkendala kewajiban mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan Penerbitan SK Tugas Belajar di Pusdik dan Biro SDMAO yang prosesnya lama.

#### 5. IKM 13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	84	-	-	-	-	87,75	-

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran, sehingga nilainya belum ada. Penilaian akan dilakukan terhadap komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa

kegiatan utama, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja. Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP; Penyusunan rencana kerja 2024, Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- b. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 dan pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- c. Pelaporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023.

#### 6. IKM 14 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2023

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2023 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan belum diterbitkan oleh BPK sehingga di periode triwulan I 2024, belum ada capaian. Sampai dengan periode triwulan I 2024, Ditjen PSDKP memiliki sisa temuan BPK RI sebanyak 16 rekomendasi yang terdiri dari: 1 rekomendasi atas laporan kinerja Semester I TA 2010 atas pengadaan kapal pengawas, 4 rekomendasi atas LK 2017, 2 rekomendasi atas kinerja *illegal fishing* Tahun 2017 s.d. Semester I 2020, 2 rekomendasi atas LK 2021 dan 7 rekomendasi atas LK 2022.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu rapat progress tindak lanjut setiap bulan guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari unit kerja yang menjadi PIC atas temuan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

#### 7. IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
<b>89,80</b>	46,81	100	80	80	84,29	105	105	80	105

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan rekapitulasi temuan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 1 April 2024,

Ditjen PSDKP memiliki 24 Objek Pemeriksaan yang masuk kedalam objek perhitungan Capaian IKU TW I dengan detil sebanyak 70 saran rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama periode pemantauan 1-5 April 2024, Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti dengan tuntas sebanyak 59 saran rekomendasi dan sisanya sebanyak 11 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut oleh satker. Sehingga hasil persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja sebesar 84.29%. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I 2024, capaian yang diperoleh sebesar 105% dari target.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya adalah melaksanakan rapat tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP setiap bulan dan turut mengundang Inspektorat mitra guna mendapatkan hasil optimal pada perhitungan capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja. Adapun masalah yang dihadapi adalah kurang *responsive*-nya satuan kerja memiliki sisa temuan atas temuan yang telah disampaikan sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
1	Setjen	61	60	98.36%	1	1.64%
2	BPPSDMKP	102	88	86.27%	14	13.73%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	226	189	83,63	37	16,37
4	Ditjen PSDKP	70	59	84,29	11	15,71
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	385	359	93.25%	26	6.75%
6	Ditjen PKRL	204	193	94.61%	11	5.39%
7	Ditjen PDSPKP	60	60	100.00%	0	0.00%
8	BPPMHKP	114	96	84.21%	18	15.79%
9	Itjen	22	21	95.45%	1	4.55%
<b>TOTAL</b>		<b>1.244</b>	<b>1.125</b>	<b>90,43%</b>	<b>119</b>	<b>9,57%</b>

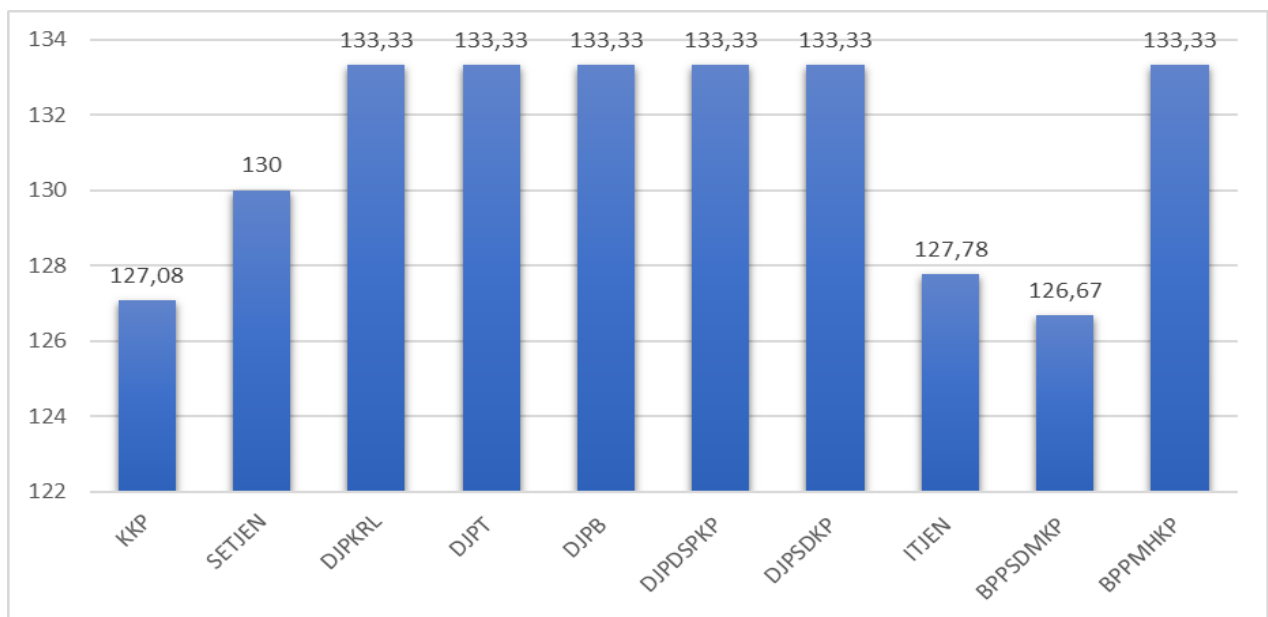
## 8. IKM 16 Presentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
99,06	97,34	98,37	94	94	133,33	142	142	94	142

Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar" sebesar 133,33 yang diperoleh dari pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi *collaboration office* (<https://portal.kkp.go.id>) pada menu Pengetahuan. Setiap pegawai dapat mengunggah berupa kegiatan, infografis, dan video/jurnal pengetahuan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator ini diantaranya adalah beberapa pegawai belum mengerti cara menggunakan aplikasi collaboration office termasuk cara membuat video pengetahuan. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian tanggal kegiatan dengan periode yang dinilai (cth. Postingan pada triwulan I 2024, namun kegiatan yang diposting pada bulan Desember 2023).

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



### 9. IKM 17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan <sup>1)</sup> ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP <sup>2)</sup> perencanaan dan persiapan pengadaan <sup>3)</sup> presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE <sup>4)</sup> kesesuaian tahap pelaksanaan <sup>5)</sup> Laporan penyelenggaraan PBJ <sup>6)</sup> persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2024, pembahasan TKDN dan pengisian kertas kerja penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, pembahasan usulan rekomendasi PBJ produk impor dan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri dibawah 25%, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan dan progres pada aplikasi AMEL.

#### 10. IKM 18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan <sup>1)</sup> pengelolaan rencana kebutuhan BMN, <sup>2)</sup> ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, <sup>3)</sup> penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), <sup>4)</sup> pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan <sup>5)</sup> Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode trwulan I tidak ada capaian. Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu penandatanganan Berita Acara Utilisasi Penggunaan BMN dengan Ditjen Perikanan Tangkap. Selain itu, dilakukan pengelolaan BMN secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 11. IKM 19 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak

mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Sampai dengan triwulan I 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

## 12. IKM 20 Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	85	85	91,59	108	108	-	-

Berdasarkan Kepmen KP 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, survei dilakukan terhadap 5 produk layanan melalui aplikasi SiSUSAN KKP yang diperoleh dari 1502 responden pada 15 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan hasil penghitungan survei sebagai berikut:

- A. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang terdiri dari produk layanan:
  - Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) : 96.15
  - Pemberian akses pemantauan kapal perikanan: 97.22
  - Analisis Pergerakan Kapal Perikanan: 93.06
- B. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO): 90.80
- C. Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI): 93.84

Nilai SKM Direktorat Jenderal PSDKP setelah dikonversi memperoleh nilai 91,59 dengan mutu pelayanan kategori “ Sangat Baik”. Capaian ini di atas target triwulan I 2024 yang sebesar 85. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah keterlambatan upload Laporan SKM ke aplikasi Susan, dan kendala di aplikasi Susan sehingga filenya tidak bisa dibuka. Dalam rangka perbaikan kedepan, UPP didorong melakukan upload dokumen ke aplikasi Susan KKP dan menyampaikan kepada Pusdatin untuk gangguan dimaksud. Pada periode selanjutnya, UPP diharapkan untuk terus meningkatkan hasil SKM dengan melakukan sosialisasi pemahaman dalam pengisian kuisioner.

### 13. IKM 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	93,76	-	-	-	-	80	-

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran, sehingga belum ada nilai yang disajikan.

### 14. IKM 22 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	-	-	-	-	89	-

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar diperoleh nilai optimal nilai kinerja anggaran tahun 2024, antara lain:

- Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
- Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
- Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;



- e. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
- f. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya pergantian operator baru di Sakter sehingga menyebabkan banyak yang belum paham terkait cara penginputan CRO di Aplikasi SAKTI dan monitoring CRO pada Aplikasi Monev Kemenkeu sehingga Perlu dilakukan sosialisasi Kembali terkait cara penginputan dan monitoring NKA agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

### C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan triwulanan, namun dihitung tahunan.

### D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp. 147.986.850.045 atau sebesar 12,97%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2024, melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP tahun 2024 (data OMSPAN 31 Maret 2024), sebagai berikut:

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Direktorat POA	445.134.101.000	47.809.589.885	10.74%
2	Direktorat PPSDK	16.701.293.000	2.312.650.368	13.85%
3	Direktorat PPSDP	11.768.640.000	820.927.926	6.98%
4	Direktorat PP	10.853.500.000	788.634.021	7.27%

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5	Sekretariat DITJEN. PSDKP	115.517.079.000	21.210.365.939	18.36%
6	UPT PSDKP	533.538.287.000	75.044.681.906	14,07%
7	Dekonsentrasi	7.884.168.000	-	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.141.397.068.000</b>	<b>147.986.850.045</b>	<b>12,97%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada triwulan I Tahun 2024, Ditjen PSDKP telah menetapkan target untuk 8 indikator kinerja dari 22 indikator, dan mampu dicapai dengan nilai kinerja organisasi sebesar **106,97%** atau kategori “**Baik**”. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi sebesar **12,97%**.

### B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja eselon I lingkup Ditjen PSDKP terkait hasil pemeriksaan dan verifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
3. Melakukan penelaahan dan penajaman formulasi penghitungan kinerja tahun 2024, khususnya kriteria yang ditetapkan agar capaian kinerja yang dihitung semakin handal.